GUANGZHOU KOTA KEMBAR SURABAYA
Pemandangan perkotaan Guangzhou, Guangdong, Tiongkok, Minggu (7/7). Guangzhou merupakan salah satu kota terbesar di Tiongkok dan menjadi kota kembar Surabaya, Jawa Timur.

IDN/ANTARA

Amnesty Desak PBB Selidiki Operasi Narkoba Filipina

Ribuan orang tewas dalam operasi pemberantasan narkoba Filipina.

MANILA (IM) -Amnesty International menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan penyelidikan internasional terhadap tindakan kejahatan kemanusiaan di Filipina. Dalam sebuah penelitian yang dirilis pada Senin (8/7), pembunuhan di luar hukum dalam kasus perang melawan narkoba yang dilancarkan oleh Presiden Rodrigo Duterte telah mencapai ambang batas terhadap kejahatan kemanusiaan.

Sekitar 6.000 orang, sebagian besar telah dituduh melakukan kejahatan narkoba kecil dan terbunuh dalam operasi anti-narkotika yang diluncurkan oleh Duterte pada 2016. Tetapi, kelompok-kelompok nonpemerintah mengklaim jumlah korban jiwa yang jauh lebih tinggi. Termasuk banyak tersangka yang terbunuh oleh orang-orang bersenjata, yang dicurigai dibiayai oleh petugas polisi.

Amnesty International mengatakan, Provinsi Bulacan yang terletak di utara Manila telah menjadi ladang pembunuhan paling berdarah di Filipina. Tingkat pembunuhan meningkat setelah beberapa petugas yang terlibat dalam operasi anti-narkotika dipindahkan ke provinsi tersebut dari Manila.

"Di dalam komunitas yang terpinggirkan, polisi terus membunuh dengan impunitas total, memicu iklim ketakutan yang meluas di kota-kota, kota-kota, dan lingkungan. Ketergantungan pada kebijakan kekerasan dan represif terus berlanjut untuk melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran di negara ini," ujar Amnesty International dalam pernyataannya.

Amnesty International menyelidiki 20 insiden terkait narkoba, di mana 27 orang terbunuh di Bulacan pada Mei-April 2018. Mereka mewawancarai para saksi, keluarga korban, pejabat setempat, dan aktivis hak asasi. Amnesty International menyimpulkan, setengah dari insiden pembunuhan tersebut merupakan eksekusi di luar pengadilan. Sementara, kasus lainnya belum dapat disimpulkan karena kesulitan memperoleh informasi mengenai pembunuhan tersebut.

Menurut Amnesty International, petugas polisi selalu membenarkan kematian dengan mengklaim bahwa tersangka melakukan perlawanan. Selain itu, polisi secara paksa masuk ke rumah-rumah dan melepaskan tembakan, kemudian mengklaim para tersangka melakukan perlawanan.

Amnesty International mempertanyakan keakuratan daftar pantauan narkoba, yang berisi nama-nama tersangka narkoba yang ditargetkan dalam penggerebekan polisi. Mereka meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk segera memulai penyelidikan atas kasus pembunuhan tersebut. Mereka meminta jaksa penuntut Pengadilan Kriminal Internasional untuk mempercepat pemeriksaan dan membuka penyelidikan terpisah.

"Pemerintah asing harus menggunakan semua alat diplomatik dan politik untuk menekan Filipina agar segera mengakhiri semua kejahatan yang dilakukan di bawah penumpasan, dan menghentikan bantuan asing atau dukungan apa pun yang dapat berkontribusi pada komisi pelanggaran hak asasi manusia oleh petugas kepolisian, " ujar pernyataan Amnesty Internasional.

Terkait laporan tersebut, pemerintah Filipina belum memberikan tanggapan. Presiden Duterte dan kepolisian membantah ada otorisasi pembunuhan di luar proses hukum. Dalam setiap pidatonya, Duterte selalu mengancam para tersangka narkoba dengan tindakan tembak mati. ● **tom**

WHO Didesak Nyatakan Ebola di Kongo Darurat Internasional

LONDON (IM)- Wabah ebola yang selama setahun terakhir terjadi di Kongo telah berada di luar kendali. Menteri Pembangunan Internasional Inggris Rory Stewart mendesak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah ebola di Kongo darurat internasional.

Stewart melakukan kunjungan selama dua hari ke Kongo, dan mengunjungi pusat-pusat kesehatan darurat serta para korban yang terjangkit Ebola. Menurut WHO, sejauh ini sebanyak 2.400 orang terjangkit ebola dan 1.606 telah meninggal dunia.

Kami berada di tepi dengan krisis ini. Kami terus menariknya dari tepi jurang tetapi sangat berbahaya. Skenario kasus terburuk adalah jika angka yang keluar sama dengan angka yang bisa divaksinasi. Karena rasa tidak aman, daerah-daerah yang kelihatannya bersih dari penyakit, seperti Beni, telah membuat populasi kembali menderita," ujar Stewart kepada *The Guardian*, Senin (8/7).

Stewart mengatakan, WHO telah tiga kali menolak menyatakan wabah ebola sebagai darurat kesehatan global. Menurutnya, dengan mendeklarasikan ebola sebagai darurat internasional, maka akan memudahkan WHO mendapatkan dana tambahan.

"Ini jelas darurat kesehatan masyarakat. Ketika Anda berbicara dengan seseorang yang menderita penyakit itu, petugas kesehatan menjauh karena bahkan dengan peralatan pelindung sekalipun, orang-orang masih terjangkit ebola dan kisah-kisahnya memilukan," kata Stewart.

WHO telah menyatakan keprihatinan yang mendalam atas wabah ebola yang berlangsung di Kongo. Meski beberapa tren epidemiologis positif, perluasan penyakit dan infeksi berulang terjadi di daerah-daerah di negara itu seperti Mabalako. Penanganan atas pengendalian wabah penyakit itu dinilai masih terhambat oleh kurangnya dana dan fasilitas memadai. Demikian juga dengan kurangnya sumber daya manusia. ● **ans**

AS Ancam Jatuhi Sanksi Lanjutan untuk Iran

MIKE POMPEO
Sekretaris Negara AS

WASHINGTON (IM)- Sekretaris Negara Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan Iran akan menghadapi sanksi lebih lanjut karena dugaan pelanggaran batas pengayaan uranium.

"Perluasan program nuklir Iran terbaru akan mengarah pada isolasi dan sanksi lebih lanjut," kata Pompeo di Twitter, dilansir Aljazirah, Senin (8/7).

Iran juga mengancam akan meninggalkan lebih banyak komitmennya dalam kesepakatan nuklir Iran 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), kecuali ada solusi ditemukan dengan pihak-pihak dalam perjanjian JCPOA.

Kesepakatan tersebut sebelumnya bertujuan mencegah Iran untuk membuat bom atom. Dalam kesepakatan itu, Iran harus membatasi program nuklir dan mendapat inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Sebagai gantinya, Iran menikmati pencabutan sebagian sanksi internasional.

Namun, Presiden AS Donald Trump menarik AS dari JCPOA tahun lalu. AS kemudian menerapkan kembali sanksi yang melemahkan ekonomi Iran. Padahal, Iran dinyatakan telah mematuhi kesepakatan nuklir.

Menghadapi hal itu, Iran berupaya menekan pihak-pihak yang tersisa untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir. Iran juga mengancam untuk melangkah lebih jauh dan meninggalkan lebih banyak komitmen nuklir kecuali mitra yang tersisa Inggris, Tiongkok , Prancis, Jerman, dan Rusia membantunya menghindari sanksi.

Juru bicara badan atom Iran, Behrouz Kamalvandi mengatakan persiapan teknis untuk tingkat pengayaan baru akan selesai dalam beberapa jam dan pengayaan lebih dari batas 3,67 persen akan dimulai. "Dan besok (Senin) pagi-pagi sekali, ketika IAEA (pengawas nuklir PBB) mengambil sampel kita akan melampaui 3,67 persen," katanya kepada wartawan di Teheran.

Wakil menteri luar negeri Iran, Abbas Araghchi mengatakan Teheran akan terus mengurangi komitmennya setiap 60 hari. Namun, ini akan berbeda jika penandatangan pakta melindunginya dari sanksi AS yang diberlakukan oleh Trump.

Sementara itu, Iran membantah sedang membuat senjata nuklir. Kesepakatan nuklir berusaha mencegah hal itu dengan membatasi pengayaan dan persediaan uranium di Teheran 300 kilogram.

Pada 1 Juli, pengawas Iran dan PBB mengakui Teheran telah mengumpulkan uranium yang lebih diperkaya lebih rendah daripada batas persediaan yang disepakati di bawah kesepakatan nuklir. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, dalam sebuah cicitan Twitter, menyatakan semua tindakan Teheran dapat dibalikkan jika negara-negara Eropa mendukung komitmen mereka. ● **gul**

Putra Mantan Menteri Korea Selatan Membelot ke Korea Utara

SEOUL (IM)- Putra seorang mantan menteri Korea Selatan yang melarikan diri ke Amerika Serikat (AS) sebelum membelot ke Korea Utara, telah mengikuti jejak almarhum orangtuanya. Dalam sebuah langkah yang langka, pembelot Korea Selatan itu mengatakan bahwa dia akan mengabdikan hidupnya demi reunifikasi kedua Korea.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengonfirmasi pada Minggu (7/7), bahwa Choe In-guk, putra mantan menteri luar negeri Korea Selatan Choe Tok-sin dan Ryu Mi-yong, mendarat di Pyongyang pada Sabtu (6/7) . Kementerian mengatakan bahwa keadaan di sekitar kunjungannya adalah subyek dari sebuah investigasi.

Berdasarkan laporan kantor berita Korea Selatan, kementerian mengatakan bahwa Choe tidak meminta persetujuan untuk perjalanannya. Di bawah peraturan saat ini, warga Korea Selatan harus mendapatkan izin dari Seoul dan Pyongyang sebelum melintasi perbatasan ke Utara. Choe diyakini telah melakukan perjalanan melalui negara ketiga untuk menghindari larangan tersebut.

Foto-foto sambutan Choe di Bandara Pyongyang diterbitkan oleh situs web berita Korea Utara yang dikontrol negara, Uriminzokkiri.

Dalam foto-foto tersebut, Choe tampak tersenyum ketika ia disambut dengan karangan bunga yang disajikan oleh pejabat Korea Utara, yang tampak sangat gembira saat kedatangannya. Dalam sebuah pernyataan yang dia berikan sesaat setelah menginjakkan kaki di tanah Korea Utara, Choe yang berusia 73 tahun menyesal tidak menetap di Pyongyang sebelumnya, dan memuji mantan pemimpin negara itu Kim Il-sung, Kim Jong-il dan pemimpin saat ini, Kim Jong-un, dan "cinta dan perhatian besar" mereka untuk keluarganya.

Ayah Choe In-guk, Choe Tok-sin, berselisih dengan Presiden Korea Selatan, Park Chung-hee pada 1970-an dan berusaha beremigrasi ke AS pada 1976. Kariernya membuat tikungan tajam pada 1980-an ketika dia, bersama dengan istrinya, Ryu Mi-yong, pindah ke Korea Utara setelah beberapa pertemuan dengan Kim Il-sung.

Keduanya menjadi anggota elit politik di rumah baru mereka. Choe Tok-sin menjabat sebagai wakil kepala Komite Pyongyang untuk Reunifikasi Damai Tanah Air, sementara istrinya adalah ketua partai kecil Korea Utara dan dianugerahi beberapa penghargaan pemerintah yang bergengsi.

"Untuk tinggal dan mengikuti negara di mana saya merasa bersyukur adalah jalan untuk melindungi kehendak yang ditinggalkan oleh orangtua saya. Jadi saya memutuskan untuk secara permanen tinggal di Korea Utara, meskipun terlambat," kata Choe, bersumpah untuk melanjutkan pekerjaan orang tuanya, sebagaimana dilansir RT, Senin (8/7).

Choe telah berulang kali mengunjungi Korea Utara dengan alasan kemanusiaan sebelumnya, dengan seizin Seoul. Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengungkapkan bahwa Choe telah melakukan perjalanan 12 kali sejak 2001, termasuk untuk pemakaman ibunya pada 2016 dan layanan peringatan kematiannya dalam dua tahun berikutnya. ● **tom**

IDN/ANTARA

MASJID RAYA XI'AN
Seorang petugas masjid melintas di samping gerbang Masjid Raya Xi'an di Xi'an, Shaanxi, Tiongkok, Sabtu (6/7). Masjid yang diperkirakan dibangun pada abad ketujuh tersebut merupakan salah satu masjid tertua dan terbesar di Tiongkok.

Toko Sayur dan Buah di Melbourne Didenda Rp 2,5 M karena Bayar Rendah Pekerja

MELBOURNE (IM)- Sebuah perusahaan yang memiliki beberapa toko buah dan sayur di kawasan Melbourne Timur telah dikenai denda $AUD 243 ribu (sekitar Rp 2.5 miliar) karena membayar rendah pekerja mereka dan memalsukan catatan pembayaran gaji.

Pengadilan Federal Australia memutuskan bahwa perusahaan A & S Wholesale Fruit and Vegetables Pty Ltd untuk membayar denda setelah mereka mengakui bahwa mereka tidak membayar pegawai mereka sekitar $AUD 133 ribu.

Perusahaan itu mempekerjakan tiga orang yang bekerja di beberapa toko di kawasan Chirnside Park, Fountain Gate, Parkmore dan Dandenong antara tahun 2012 dan 2014.

Hukuman denda tersebut dijatuhkan setelah Fair Work Ombudsman memperkarakan mereka karena tidak membayar upah lembur dan upah bekerja di akhir pekan.Menurut pengadilan, perusahaan itu sebelumnya telah membayar upah pegawai dengan kisaran antara $ 10 sampai $ 18.52 per jam, dan paling sedikit dua pekerja mereka dibayar tanpa pembukuan resmi.

Oleh karena itu, perusahaan A&W Wholesale dikenai denda $ 200 ribu (sekitar Rp 2 miliar), dan direktur utama perusahaan Stephen Fanous dikenai denda $30,000 dan manajer operasi therah Louli $13,000. Menurut pengadilan, Famous paling terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan, sementara Louli hanya terlibat dalam hal yang berkenaan dengan catatan pembukuan dan slip gaji.

Fair Work Ombudsman Sandra Parker mengatakan yang memprihatinkan dari kasus ini adalah bahwa adanya unsur kesengajaan dari perusahaan untuk mengeksploitasi pekerja mereka. "Mereka memiliki dua pembukuan, dimana yang satu berisi catatan yang benar, dan satu lagi mereka melakukan pemalsuan, dengan sengaja menyembunyikan bagaimana mereka membayar rendah pegawai di bawah gaji minimum." kata Sandra Parker.

Parker mengatakan bahwa para pekerja itu tidak mendapatkan bukti pembayaran gaji sehingga ombudsman harus mengecek berapa jam mereka bekerja dengan menggunakan bukti dari perjalanan tol yang dilakukan para pekerja. ● **ans**

Starbucks Minta Maaf Telah Usir Polisi

ARIZONA(IM) -Starbucks Corp meminta maaf setelah seorang karyawan di salah satu tokonya di Tempe, Arizona, AS meminta enam petugas kepolisian pergi atau keluar dari jalur pandang pelanggan, Minggu (8/7). Tindakan tersebut memicu reaksi di media sosial.

Sejumlah polisi mengunjungi toko tersebut pada 4 Juli dan telah membayar minuman. Kemudian, seorang karyawan mendekati mereka tentang pelanggan yang merasa tidak aman karena kehadiran polisi. "Perlakuan terhadap pekerja keselamatan publik ini tidak bisa lebih mengecewakan. Sementara si barista sopan, membuat permintaan semacam itu tetap menyinggung," ujar Asosiasi Petugas Tempe di Twitter.

Setelah kejadian itu, para pengguna Twitter melakukan dukungan untuk polisi, dengan mentwit komentar bersama dengan tagar #boycottstarbucks. Dalam sebuah permintaan maaf di sini yang ditujukan kepada Departemen Kepolisian Tempe dan diunggah di situsnya, starbucks mengatakan perlakuan terhadap para petugas itu sama sekali tidak dapat diterima.

"Atas nama Starbucks, saya ingin dengan tulus meminta maaf kepada Anda semua atas pengalaman yang dimiliki enam petugas Anda di toko kami pada 4 Juli. Apa yang terjadi di toko kami pada 4 Juli bukanlah pengalaman yang harus dimiliki oleh petugas atau pelanggan Anda, dan di Starbucks, kami sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ini tidak terjadi lagi di masa depan," tulis Wakil Presiden Eksekutif Starbucks Rossann Williams.

Tahun lalu, perusahaan terperosok dalam insiden profil rasial yang melibatkan penangkapan dua pria kulit hitam di sebuah toko di Philadelphia. Starbucks kemudian berdamai dengan orang-orang itu secara pribadi, dan untuk sementara waktu menutup 8.000 toko AS untuk pelatihan anti-bias. ● **gul**

IDN/ANTARA/REUTERS

UNJUK RASA AKTIVIS LINGKUNGAN DI SWISS
Aktivis lingkungan memblokir jalan masuk kantor pusat bank Credit Suisse di Zurich, Swiss, Senin (8/7).

ARGO PANTES
INTEGRATED TEXTILE INDUSTRY

PT. ARGO PANTES Tbk.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 31 Juli 2019
Waktu : 10:30 WIB
Tempat RUPS : Ruang Training Perseroan
Jl. M.H Thamrin Km. 4 Cikokol, Tangerang 15117

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal **31 Desember 2018** dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris.
   Penjelasan: Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal **31 Desember 2019**.
   Penjelasan: Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penetapan atas akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan dilakukan melalui RUPS.
3. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
   Penjelasan : Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi Pasal 96 dan Paaal 113 UUPT
4. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
   Penjelasan: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Perseroan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menggunakan standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan bermaksud merubah narasi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha. Perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha ini, bukan termasuk perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan XI.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Iklan pemanggilan ini, sesuai dengan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **08 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB**.
3. a. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa para pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau penjabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
   b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di PT Argo Pantes Tbk., Jl. M.H. Thamrin Km 4, Cikokol Tangerang 15117, Banten, Indonesia (Bagian Corporate Secretary).
   c. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, kepada petugas pendaftaran Perseroan.
5. Bagi para pemegang saham badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan, PT Argo Pantes Tbk., Jl. M.H. Thamrin Km 4, Cikokol Tangerang 15117, Banten, Indonesia (Bagian Corporate Secretary).
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Juli 2019
Direksi Perseroan